Published every February and August
ISSN 2443-2776
INSANCITA
Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia

HELMAWATI

Meningkatkan Pendidikan Perempuan Indonesia melalui Optimalisasi *Majelis Ta'lim*

ABSTRAKSI: *Artikel ini, dengan menggunakan metode kualitatif dan penjelasan yang deskriptif, mengkaji tentang majelis ta'lim sebagai salah satu wahana untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pendidikan perempuan di Indonesia. Majelis ta'lim merupakan salah satu bentuk dan wadah pendidikan non-formal yang banyak terdapat di kota-kota dan pedesaan-pedesaan di Indonesia. Eksistensi dan peran majelis ta'lim tentu dapat dijadikan tempat oleh para jemaah dalam menuntut ilmu dan menambah pengetahuan. Kebanyakan jamaah adalah perempuan (ibu-ibu), yang datang ke majelis ta'lim pada umumnya untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama. Tidak heran ketika ditemukan data bahwa mayoritas jemaah ibu-ibu mayoritas berusia di atas 40 tahun. Hal ini sesuai dengan awal didirikannya majelis ta'lim, yaitu sebagai tempat untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dapat dihindari, sekarang ini fungsi majelis ta'lim harus dioptimalkan bukan hanya sebagai tempat pemenuhan kebutuhan agama saja, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan umum lainnya, keterampilan, dan kewirausahaan yang bermanfaat bagi kehidupan sosial dan ekonomi jemaah itu sendiri. Selain itu, ilmu pengetahuan yang diperoleh di majelis ta'lim bukan hanya bermanfaat bagi jemaah itu sendiri, namun juga ilmu yang diperoleh dari majelis ta'lim dapat diimplementasikan dalam keluarga, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai. Untuk itu, fungsi dari komponen majelis ta'lim harus direvitalisasi agar tercapai manfaat yang lebih luas lagi.*
KATA KUNCI: *Majelis Ta'lim; Optimalisasi; Revilatilisasi; Pendidikan Non-Formal; Agama Islam.*

ABSTRACT: *"Improving Indonesian Women Education through Optimization of Majelis Ta'lim". This article, using qualitative method and descriptive explanation, examines the "majelis ta'lim", or Islamic education assembly, as one of the rides to participate in the intellectual life of the nation, especially the education of women in Indonesia. "Majelis ta'lim" is one of the non-formal education institutions, which spread out in every towns or villages in Indonesia. The existence and role of "majelis ta'lims" are as a place to gain knowledge of the "jemaah" or people who come to gain knowledge in the "majelis ta'lim". Most of "jemaah" are women, who come to "majelis ta'lim" to gain religious knowledge. That why most of "jemaah" age are more than 40 years old. It is accordingly to the firstly aim of "majelis ta'lim" was held, namely as place to broadcast Islamic religion values. As the growth of sciences and technology that can't be avoided, the function of "majelis ta'lim" must be optimized, in which the function is not only as the place to gain religious knowledge but also as the place to gain others knowledge, skills, and entrepreneurship to fulfill social as well as economic domestic of "jemaah". Beside that knowledge which is received by the "jemaah" not only must advantages for the "jemaah" own-selves, but also knowledge itself can be implemented in the family, especially to educate their children, so that the goal of education can be reached. Accordingly, the function of components of "majelis ta'lim" must be revitalized to give wider advantages.*
KEY WORD: *Majelis Ta'lim; Optimization; Revitalization; Non-Formal Education; Islamic Religion.*

About the Author: **Dr. Helmawati** adalah Dosen Pascasarjana PAI/FAI UNINUS (Pendidikan Agama Islam/Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Nusantara), Jalan Soekarno Hatta, No.530 Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademik, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: helmawati.dr@gmail.com

Suggested Citation: Helmawati. (2018). "Meningkatkan Pendidikan Perempuan Indonesia melalui Optimalisasi *Majelis Ta'lim*" in *INSANCITA: Journal of Islamic Studies in Indonesia and Southeast Asia*, Volume 3(1), February, pp.65-88. Bandung, Indonesia and BS Begawan, Brunei Darussalam: Minda Masagi Press owned by ASPENSI and BRIMAN Institute, ISSN 2443-1776.
Article Timeline: Accepted (November 10, 2017); Revised (January 15, 2018); and Published (February 28, 2018).

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam

ISSN 2443-2776 *and* ***www.mindamas-journals.com/index.php/insancita***

PENDAHULUAN

Setiap manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Demikian juga dengan kaum perempuan, yang memiliki tanggung jawab dalam keluarga untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai isteri dan ibu. Melalui ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat membantu mengoptimalkan fungsi dan perannya dalam keluarga (Wahy, 2012; dan Syahraeni, 2015).

Minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki kaum perempuan dapat mereduksi fungsi dan perannya sebagai isteri dan ibu dalam keluarga. Ilmu pengetahuan yang tepat dan dimiliki oleh kaum perempuan, terutama dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak, membantu mereka menjadi manusia yang utuh dan bahagia. Sebaliknya, pendidikan dan pengasuhan yang tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan yang tepat dapat menghambat tumbuh-kembang anak di kemudian hari (Ainiyah, 2015; dan Rosita, 2017).

Fenomena *illiteracy,* atau buta aksara, di Indonesia – dengan mengutip Fathiyah Wardah melalui *Berita RSS*, Rabu, 24 Agustus 2011, menyatakan bahwa data terbaru menunjukan sekitar 5 juta lebih perempuan Indonesia masih buta huruf (dalam Sahputra, 2012). Sementara itu, pemerintah menjanjikan akan menekan angka buta huruf di Indonesia. Saat ini, sekitar 8.3 juta jiwa masyarakat Indonesia masih mengalami buta huruf; 5.1 juta jiwa di antaranya adalah perempuan. Sekitar 5 dari 10 provinsi dengan tingkat buta huruf tertinggi, hingga di atas 10%, diantaranya adalah Papua, NTT (Nusa Tenggara Timur), NTB (Nusa Tenggara Barat), Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan (dalam BPS, 2015). Selanjutnya, website www.jkt.kompas.com, tertanggal 21 Oktober 2011, menginformasikan bahwa saat ini tercatat sekitar 8.3 juta warga negara Indonesia penyandang buta aksara. Sebagian besar adalah orang-orang yang berusia di atas 40 tahun (dalam Firdaus, 2016).

Melihat data tersebut, wajar ketika budaya membaca sebagai sumber pengetahuan di Indonesia kurang tampak. Sebab minimnya pengetahuan, banyak orangtua, terutama ibu-ibu, yang mendidik anak seperti mereka dahulu dididik dan diasuh oleh para orangtuanya. Padahal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengaruh percepatan globalisasi, nilai-nilai yang tidak dapat dicegah hanya dapat dibendung pengaruh negatifnya dengan ilmu pengetahuan dan keimanan, serta pengawasan dari para orangtua, terutama ibu. Dampak minimnya ilmu pengetahuan dan perhatian dari kaum perempuan (ibu) terhadap anak-anak menyebabkan kasus seperti kekerasan terhadap anak, penelantaran anak, dan lainnya kerap terjadi (Gulton & Siregar, 2005; dan Wahid & Irfan, 2009).

Dalam konteks ini, Ahmad Tafsir (2008) menyatakan bahwa lebih-kurang 600 tahun SM (Sebelum Masehi), orang-orang Yunani telah menyatakan bahwa pendidikan ialah usaha membantu manusia menjadi manusia (Tafsir, 2008:33). Pendidik utama, dalam hal ini orang tua, banyak yang kurang memahami esensi pendidikan terhadap anak-anaknya, sehingga beberapa kasus mengungkapkan bahwa ada orang tua yang memaksakan pendidikan untuk anaknya; sementara anaknya tidak merasa memiliki minat dan potensi untuk memenuhi keinginan orang tuanya. Keinginan orang tua yang seperti itu bukannya membantu mengembangkan potensi anak sehingga menjadi manusia

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776** and **www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

yang berhasil, tetapi membantu anak menjadi manusia yang gagal (Tafsir, 2008; dan Djamarah, 2014).

Oleh karena itu, permasalahan yang banyak dihadapi orang tua sebagai pendidik, diantaranya adalah: *pertama*, orang tua tidak memiliki ilmu pendidikan dan pengetahuan yang memadai; *kedua*, orang tua sibuk bekerja, sehingga tidak memiliki waktu untuk mendidik anaknya; *ketiga*, kesulitan dalam mencari sekolah yang baik; *keempat*, komunikasi yang tidak efektif; serta *kelima*, permasalahan ekonomi (Mahahiri, 2002; dan Djamarah, 2014).

Ahmad Tafsir (2008), kembali lagi, mengemukakan bahwa pendidikan informal dalam keluarga kurang baik mutunya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya ilmu dan teori-teori pendidikan yang dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik di rumah tangga, sekolah, maupun lembaga-lembaga pendidikan lainnya (Tafsir, 2008:291). Maka, dalam pergeseran perkembangan zaman yang semakin canggih dan modern, pendidikan keagaamaan menjadi dasar pembentukan karakter yang perlu diperhatikan. Pendidikan tidak boleh berat sebelah, yang hanya difokuskan pada tujuan pencapaian kognitif saja. Iman dan ilmu pengetahuan harus sejalan untuk membantu manusia menjadi individu yang sempurna (Megawangi *et al.*, 2005; Tafsir, 2008; dan Ismail, 2017:14).

Perempuan yang kurang, bahkan tidak memiliki cukup ilmu pengetahuan, akan merugi. Banyak perempuan yang terkena tipu-daya, karena tidak memiliki ilmu. Banyak juga perempuan yang diperlakukan tidak patut, karena tidak memiliki ilmu. Dan timbulnya kekerasan atau penganiayaan dalam rumah tangga pun, baik yang dilakukan oleh laki-laki maupun oleh perempuan, salah satunya disebabkan karena manusianya tidak atau kurang cukup memiliki ilmu (Mahahiri, 2002; Djamarah, 2014; dan Nurtjahyo & Ramadhan eds., 2016).

Kasus minimnya ilmu pengetahuan dan keimanan membuat seorang ibu tega "menjual" anak perempuan atau anak kandungnya sendiri (*human trafficking*), walaupun *human trafficking* itu tidak semuanya dilakukan oleh perempuan, dan memang hampir sebagian besar perempuan yang menjadi korbannya. Data yang dirilis oleh IOM (*International Organization for Migration*) di Indonesia, pada tahun 2011 saja, menunjukan bahwa Indonesia menempati peringkat teratas dengan jumlah 3,943 korban perdagangan manusia. Dari jumlah itu, kasus terbanyak terjadi di Jawa Barat, yakni sebanyak 920 kasus atau 23.33% (IOM, 2014; dan Deny, 2015).

Kemudian, Komnas PA (Komisi Nasional Perlindungan Anak) mencatat dalam semester satu di tahun 2013, atau mulai Januari sampai akhir Juni 2013, bahwa ada 1,032 kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia, dan 52% dari 1,032 kasus tersebut adalah kekerasan seksual. Dari jumlah itu, kekerasan fisik tercatat ada 294 kasus atau 28%; kekerasan psikis 203 kasus atau 20%; dan kekerasan seksual 535 kasus atau 52% (dalam Sasongko, 2014). Sebenarnya, data kekerasan pada anak jauh lebih banyak dari data itu. Karena data itu hanya yang terlaporkan saja; manakala yang tidak terlaporkan bisa jadi mencapai 3 kali lipatnya (Setyawan, 2015).

Sementara kasus kekerasan pada anak, baik itu laki-laki maupun perempuan pada bulan Januari sampai Mei 2014, lebih dari 400 kasus dibanding selama

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 and www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

tahun 2013, yang sebanyak 502 aduan (dalam Franciska, 2015). Kasus kekerasan dan pelanggaran hak, kebanyakan justru dialami oleh perempuan. Sedangkan data lain dari www.tempo.com di Jakarta, misalnya, menyatakan bahwa Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat adanya peningkatan temuan korban kekerasan pada perempuan. Komnas (Komisi Nasional) merekam 279,760 kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi sepanjang 2013, lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 216,156 kasus. Dan kekerasan terhadap perempuan yang paling besar yaitu berada di ranah personal atau keluarga (dalam Alfiyah, 2014).

Sementara itu, fenomena *majelis ta'lim* yang tumbuh subur di Indonesia, bahkan ada di setiap wilayah RW (Rukun Warga) sampai RT (Rukun Tetangga), merupakan peluang untuk mengisi kekurangan ilmu pengetahuan bagi perempuan, yang sekaligus adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat (*learning society*) itu berperan, terutama dalam mewujudkan pembelajaran seumur hidup (*life long education*). Urgensitas *majelis ta'lim* yang demikian itulah, yang menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk menambah dan melengkapi pengetahuan yang kurang dan belum sempat mereka peroleh di lembaga pendidikan formal (Alawiyah, 1997; dan Daulay, 2009).

Haidar Putra Daulay (2009) menyatakan bahwa pendidikan Islam dalam jalur non-formal dapat dilakukan melalui kegiatan *majelis ta'lim*, yang ditujukan untuk masyarakat ramai. Kegiatan *majelis ta'lim* bergerak dalam bidang dakwah Islam (Daulay, 2009:149-150). Lazimnya disampaikan dalam bentuk ceramah, tanya-jawab oleh seorang *ustadz* atau *kyai* di hadapan para jemaahnya, kegiatan di *majelis ta'lim* biasanya telah dijadwalkan waktu dan ditentukan tempatnya, serta siapa saja *mu'allim* atau *ustadz* yang akan mentransformasikan ilmunya (Alawiyah, 1997; Daulay, 2009; dan az-Zahra, 2012).

Dalam prakteknya, *majelis ta'lim* merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat waktu. *Majelis ta'lim* bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial, dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya pun tidak terikat, bisa pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Tempat pengajarannya dapat dilakukan di rumah, masjid, mushala, gedung, aula, halaman atau lapangan, kantor, dan sebagainya. Selain itu, *majelis ta'lim* memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai lembaga da'wah dan lembaga pendidikan non-formal (Alawiyah, 1997; Daulay, 2009; dan az-Zahra, 2012).

Berdasarkan data dari Depag RI (Departemen Agama Republik Indonesia), tahun 2009, bahwa pendidikan agama dan keagamaan pada tahun 2006-2007, secara nasional, meliputi 33 provinsi dengan jumlah *majelis ta'lim* yang terdata sebanyak 158,419 buah, dan jemaah tetap berjumlah 10,182,260 orang. Sebanyak 4,223,631 orang (41.5%) jemaah laki-laki; dan sisanya sebanyak 5,958,629 orang (58.5%) adalah jemaah perempuan. Sebanyak 114,891 (72.5%) *majelis ta'lim* tersebar di 6 Provinsi di pulau Jawa, yaitu: DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI (Daerah Istimewa) Yogyakarta, dan Jawa Timur (Depag RI, 2009:2-3).

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776** and **www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26, juga menyatakan bahwa pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (Depdiknas RI, 2003; MPR RI, 2010; dan Sujatmoko, 2010).

Majelis ta'lim merupakan salah satu jenis pendidikan non-formal yang ada di Indonesia dan tumbuh subur sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Jika dioptimalkan keberadaannya, jemaah *majelis ta'lim* dapat menambah ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu pendidikan, psikologi, dan lainnya, serta keterampilan dan kewirausahaan. Ilmu pengetahuan yang diperoleh jemaah dari *majelis ta'lim* memiliki kontribusi besar, selain untuk kaum perempuan juga untuk diimplementasikan di dalam keluarga (Alawiyah, 1997; Daulay, 2009; dan az-Zahra, 2012).

Fleksibelitas *majelis ta'lim* inilah yang menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling dekat dengan umat atau masyarakat Islam. *Majelis ta'lim* juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat awam dengan para *mu'allim*, serta antara sesama anggota jemaah *majelis ta'lim* tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu (Helmawati, 2013:78).

Sebab mayoritas jemaah *majelis ta'lim* adalah kaum perempuan, atau ibu-ibu dengan rata-rata usia di atas 30 tahunan, maka ilmu pengetahuan yang diperoleh bermanfaat dalam menjalankan fungsi sebagai isteri dan ibu sekaligus. Untuk memaksimalkan fungsi dan peran perempuan, pendidikan di *majelis ta'lim* harus mampu mengakomodir kebutuhan kaum perempuan di Indonesia melalui optimalisasi program atau kurikulumnya. Dengan demikian, perlu suatu upaya untuk mengoptimalkan keberadaan *majelis ta'lim* di Indonesia (Alawiyah, 1997; Daulay, 2009; az-Zahra, 2012; dan Helmawati, 2013).

Dalam kajian ilmiah ini digunakan metode deskriptif kualitatif (Patton, 1990; Nasution, 1996; and Rahmat, 2009). Sumber data diperoleh, baik dari data primer berupa hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen, maupun angket yang diperoleh di Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, dan Jakarta. Selain itu, data sekunder berupa hasil penelitian sebelumnya yang telah terdokumentasi dalam bentuk media cetak juga digunakan untuk melengkapi pembahasan atau analisis (Miles & Huberman, 1984; Singarimbun & Efendi, 1989; dan Creswell, 1998).

Sedangkan fokus bahasan dalam tujuan berada pada dua pertanyaan, yaiu: *pertama*, apa saja komponen *majelis ta'lim* dalam peningkatan pendidikan perempuan di Indonesia; dan *kedua*, bagaimana optimalisasi komponen *majelis ta'lim* dalam meningkatkan pendidikan perempuan di Indonesia.

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 and www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Majelis Ta'lim. Menurut Dedeng Rosidin (2003), kata *ta'lim* adalah *mashdar* dari '*allama*. Para ahli bahasa Arab telah memberikan arti pada kata '*alima* dengan beberapa arti. Arti-arti itu dapat dilihat dalam penggunaannya di kalangan orang Arab. Misalnya: '*alimtu'sy-syai-a* artinya '*araftu* (mengetahui, mengenal); '*alima bi'sy-syai-i* artinya *sya'ara* (mengetahui, merasa); dan '*alima'r-rajula* artinya *khabarahu* (memberi kabar kepadanya). Kata *ta'lim* artinya *talqînu'd-darsi* (pengajaran) dan bermakna *at-tahdzîb* (Rosidin, 2003:65).

Az-Zubaidi (t.th.) menyebutkan bahwa *ta'lim* dan *al-i'lâm* adalah satu makna, yaitu pemberitahuan (Az-Zubaidi, t.th.). Sejalan dengan pendapat di atas, Al-Râghib al-Ashfahâni (t.th.) menambah penjelasan lebih rinci untuk membedakan makna di antara keduanya. Menurutnya, kata *a'lamtuhu* dan *'allamtuhu* pada asalnya satu makna, hanya saja *al-i'lâm* diperuntukan bagi pemberitahuan yang cepat, sedangkan *ta'lim* bagi pemberitahuan yang dilakukan dengan berulang-ulang dan sering, sehingga berbekas pada diri *muta'allim* atau peserta didik. Dan *ta'lim* adalah menggugah untuk mempersepsikan makna dalam pikiran (al-Ashfahâni, t.th.; Az-Zubaidi, t.th.; dan Rosidin, 2003).

Dedeng Rosidin (2003) kembali menyatakan bahwa makna *ta'lim* berdasarkan dari beberapa ahli, diantaranya: *ta'lim* adalah proses pemberitahuan sesuatu dengan berulang-ulang dan sering, sehingga *muta'allim* atau siswa dapat mempersepsikan maknanya dan berbekas pada dirinya. *Ta'lim* adalah kegiatan yang dilakukan oleh *mu'allim* dan *muta'allim* yang menuntut adanya adab-adab tertentu, bersahabat, dan bertahap. Penyampaian materi di dalam *majelis ta'lim* diiringi dengan penjelasan, sehingga *muta'allim* menjadi tahu dari yang asalnya tidak tahu, dan menjadi paham dari yang asalnya tidak paham. *Ta'lim* bertujuan agar ilmu yang disampaikan bermanfaat, melahirkan amal shaleh, serta memberi petunjuk ke jalan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk mencapai ridha Allah SWT atau *Subhanahu Wa-Ta'ala* (al-Ashfahâni, t.th.; Az-Zubaidi, t.th.; dan Rosidin, 2003:109-119).

Ta'lim merupakan kegiatan yang dilakukan oleh *mu'allim*. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya sekadar penyampaian materi, melainkan disertai dengan penjelasan, makna dan maksudnya, sehingga *muta'allim* menjadi paham, terjaga, dan terhindar dari kekeliruan, kesalahan, dan kebodohan. *Ta'lim* adalah pembinaan intelektual dan pemberian ilmu untuk mendorong amal yang bermanfaat, sehingga *muta'allim* akan menjadi suri tauladan, baik dalam perkataan maupun dalam setiap perbuatannya. *Ta'lim* dilakukan dengan niat karena Allah SWT, dengan metode yang mudah diterima (Quthb, 2003; dan Andi, 2017).

Ramayulis (2008) menyebutkan bahwa dalam *majelis ta'lim* itu adanya pengulangan pelajaran beberapa kali, serta mulai bertolak daripada yang mudah terus kepada yang sukar. Setiap kali memberikan pelajaran, selalu diulang yang sudah lalu itu dan kemudian disempurnakan dan ditambah, jadi makin lama makin luas dan lengkap serta sempurna (Ramayulis, 2008:51).

Tujuan pendidikan *majelis ta'lim*, sejalan dengan rumusan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 *and* ***www.mindamas-journals.com/index.php/insancita***

Pesantren, Departemen Agama RI (Republik Indonesia), yaitu untuk orientasi pada aspek pencerahan spiritual atau *futuh al-ilahiyyah,* di samping untuk pendalaman agama atau *tafaqquh fi al-din* (Depag RI, 2009:64 dan 97). Manakala PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa *majelis ta'lim*, atau nama lain yang sejenis, bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta (Setneg RI, 2008).

Untuk itu, peran *majelis ta'lim* sebagai lembaga pendidikan non-formal, yang berbasis masyarakat serta berfungsi sebagai tempat pendidikan seumur hidup (*life long education*), diharapkan dapat menjembatani kelemahan orang tua sebagai pendidik utama dan pertama dalam menambah ilmu keagamaan dan pengatahuan, sehingga dapat diterapkan dalam keluarganya (Depag RI, 2006:19).

Peran *majelis ta'lim* diharapkan dapat mengisi atau mengganti kekurangan pengetahuan para pendidik, khususnya kaum perempuan atau ibu-ibu, sehingga dapat memiliki pemahaman terhadap ilmu-ilmu yang dibutuhkan. *Majelis ta'lim* juga merupakan lembaga pendidikan non-formal dan sekaligus lembaga dakwah yang memiliki peran strategis dan penting dalam pengembangan kehidupan beragama bagi masyarakat. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat, seperti *majelis ta'lim*, berperan terutama dalam mewujudkan *learning society* yang berlangsung seumur hidup atau *life long education* (Alawiyah, 1997; Depag RI, 2006; Daulay, 2009; az-Zahra, 2012; dan Helmawati, 2013).

Urgensi *majelis ta'lim* demikian itulah yang menjadi salah satu solusi pada masyarakat untuk menambah dan melengkapi pengetahuan yang kurang dan belum sempat mereka peroleh. Maka, salah satu tempat untuk membimbing para pendidik, khususnya orang tua, adalah dengan melalui kegiatan *majelis ta'lim*. Selain bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia, *majelis ta'lim* juga memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan non-formal. Beberapa fungsi *majelis ta'lim* sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal, di antaranya, adalah sebagai berikut:

> *Fungsi keagamaan*, yakni membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
> *Fungsi pendidikan*, yakni menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat (*learning society*), keterampilan hidup, dan kewirausahaan;
> *Fungsi sosial*, yakni menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan, dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara, dan umat;
> *Fungsi ekonomi*, yakni sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jama'ahnya;
> *Fungsi seni dan budaya*, yakni sebaga tempat pengembangan seni dan budaya Islam; serta
> *Fungsi ketahanan bangsa*, yakni menjadi wahana pencerahan umat dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa (Depag RI, 2008:4).

Di negara Indonesia, dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, tentu akan tumbuh subur *majelis ta'lim* sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat. Sebagai salah satu contoh rinci dapat dilihat data hasil penelitian yang diperoleh dari Badan Kerjasama *Majelis Ta'lim* di Kota Bogor, Jawa Barat, pada tahun 2008/2009, yang menunjukan jumlah *majelis ta'lim* untuk kecamatan Bogor

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 and www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

Utara sebanyak 66; kecamatan Bogor Tengah sebanyak 63; kecamatan Tanah Sareal sebanyak 81; kecamatan Bogor Selatan sebanyak 56; kecamatan Bogor Timur sebanyak 101; dan kecamatan Bogor Barat sebanyak 72 *majelis ta'lim* (dalam Helmawati, 2013).

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan Ketua BKMM (Badan Kerjasama *Majelis Ta'lim* dan Masjid) serta Ketua Penamas (Pendidikan Agama Islam pada Masyarkat dan Pemberdayaan Masjid) diketahui bahwa untuk Kota Bogor di Jawa Barat saja terdapat sekitar 439 *majelis ta'lim*. Namun sangat disayangkan, dalam perjalanannya, terjadi hubungan yang tidak linier antara pertumbuhan *majelis ta'lim* dan diversifikasi atau pengembangan program kajian. Selain itu, dari hasil wawancara menunjukan bahwa BKMM dan Penamas tidak mengetahui dengan pasti *majelis ta'lim* mana yang masih aktif atau tidak, serta berapa jumlah jema'ahnya. Dan kenyataannya di lapangan, secara umum, tidak semua *majelis ta'lim* dalam proses kegiatannya memiliki catatan kegiatan atau data jema'ahnya secara pasti (Helmawati, 2013; wawancara dengan Responden A, 3/7/2016; dan wawancara dengan Responden B, 10/7/2016).

Realitas pertumbuhan *majelis ta'lim* yang tinggi itu ternyata masih sangat *pre-historic*, dalam arti bahwa ikatan antara penggagas *majelis ta'lim* dengan kegiatan materi yang dilakukan sangat erat hubungannya. Misalnya, *majelis ta'lim* yang dipimpin oleh ahli baca kitab dalam bahasa Arab akan menggunakan kitab-kitab yang berbahasa Arab sebagai rujukan kurikulum. Begitu juga dengan *majelis ta'lim* yang *ustadz*-nya ahli dalam tafsir *Al-Qur'an*, maka pembahasan atau kurikulumnya adalah kajian tafsir *Al-Qur'an,* dan seterusnya. Hal ini pada hakikatnya tidak terlepas dari persoalan kepentingan, baik kepentingan keagamaan, sosial dan kemasyarakatan, maupun kepentingan kelompok (*cf* Kristanto, 2012; dan Helmawati, 2013).

Hasil observasi yang dilakukan penulis menunjukan bahwa *majelis ta'lim* yang terbentuk di setiap RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) memiliki program atau kurikulum yang hampir sama. Hal ini disebabkan karena biasanya pengurus *majelis ta'lim* di suatu tempat, ternyata juga, mengikuti kegiatan di *majelis ta'lim* panutan atau *majelis ta'lim* induk. Beberapa pengurus *majelis ta'lim* menyatakan bahwa kegiatan atau kurikulum di *majelis ta'lim* induk dapat memberikan kontribusi pada *majelis ta'lim* yang dikelolanya. Selain itu, pengelola suatu *majelis ta'lim* akan mencari *majelis ta'lim* yang memiliki program yang sesuai dengan visi-misinya; kemudian dari *majelis ta'lim* tersebut pengurus akan membawa ilmu dan terkadang mengundang penceramahnya untuk mengisi program *ta'lim* di tempatnya (Helmawati, 2013; dan wawancara dengan Responden C, 17/7/2016).

Komponen Majelis Ta'lim di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan berbagai model dan karakter *majelis ta'lim* yang memiliki daya tarik sentral, atau *majelis ta'lim* induk, bagi *majelis-majelis ta'lim* lainnya di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, di antaranya: *Majelis Ta'lim* Masjid Al-Hijri I; *Majelis Ta'lim* Al-Ghazaly; *Majelis Ta'lim* Masjid Raya Bogor; *Majelis Ta'lim* Al-Ghifari (khusus ibu-ibu); *Majelis Ta'lim* Mahasiswa IPB (Institut Pertanian Bogor); *Majelis Ta'lim* Ibu-ibu Masjid Agung

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 *and* ***www.mindamas-journals.com/index.php/insancita***

Sukabumi; *Majelis Ta'lim* Ibu-ibu Masjid Raya Bandung; dan *Majelis Ta'lim* Ibu-ibu Masjid Istiqlal Jakarta (Helmawati, 2013).

Dari hasil penelitian di *majelis ta'lim* tersebut, ditemukan hal-hal yang berhubungan dengan tujuan, program (kurikulum), proses (pendidik dan metode), evaluasi, waktu, kapasitas tempat, dan manajemen pencatatan data *majelis ta'lim*. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, **Tujuan.** Uraian mengenai tujuan pendidikan *majelis ta'lim* tampaknya memang sejalan dengan rumusan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Departemen Agama RI (Republik Indonesia), yaitu untuk orientasi pada aspek pencerahan spiritual atau *futuh al-ilahiyyah,* di samping untuk pendalaman agama atau *tafaqquh fi al-din* (Depag RI, 2009:64 dan 97). Manakala Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 23 ayat (1), menyatakan bahwa *majelis ta'lim*, atau nama lain yang sejenis, bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*) dan akhlak mulia peserta didik, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta (Setneg RI, 2008).

Selain itu, *majelis ta'lim,* sebagai salah satu lembaga pendidikan diniyah non-formal, bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jemaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Tujuan kegiatan pengajian di *majelis ta'lim* pada umumnya adalah dalam rangka da'wah Islam. Selain itu, tujuan kegiatan di *majelis ta'lim* adalah untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan, juga penambah wawasan atau pengetahuan umum. Melalui kegiatan *majelis ta'lim* dapat membantu jemaah memecahkan masalah kehidupan dari sudut pandang ajaran Islam, baik tujuan ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sosial dan ekonomi (*cf* Alawiyah, 1997; Depag RI, 2006 dan 2008; Daulay, 2009; az-Zahra, 2012; dan Helmawati, 2013).

Kedua, **Program atau Kurikulum**. Program atau kurikulum adalah susunan materi-materi yang telah dirancang pengurus dan, kemudian, disampaikan dalam kegiatan di *majelis ta'lim*. Materi diambil dari program yang telah ditetapkan panduannya oleh Kementerian Agama RI (Republik Indonesia). Selanjutnya, materi juga dapat dikurangi dan/atau ditambah sesuai dengan visi-misi lembaga *majelis ta'lim* tersebut (Helmawati, 2013; dan wawancara dengan Responden C, 17/7/2016).

Kurikulum *majelis ta'lim* berisi ajaran Islam dengan segala aspeknya, seperti: tafsir, *hadits*, *tauhid*, *fiqh*, *tasawuf*, *tarikh* Islam, bahasa Arab, dan masalah-masalah kehidupan yang ditinjau dari aspek ajaran Islam (Alawiyah, 1997; Depag RI, 2006 dan 2008; Daulay, 2009; az-Zahra, 2012; dan Helmawati, 2013).

Berikut adalah beberapa contoh, hasil penelitian yang penulis lakukan, tentang program kajian beberapa *majelis ta'lim* di wilayah Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia:

> *Majelis Ta'lim* Masjid Al-Hijri I dengan program kajian: Tafsir *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. Untuk materi kajian, tema sesuai dengan konteks ayat *Al-Qur'an* yang dibahas secara berkesinambungan dari minggu ke minggu, kemudian diperjelas dengan *Hadits-hadits* yang relevan dengan ayat *Al-Qur'an* yang sedang dibahas tersebut.
>
> *Majelis Ta'lim* Al-Ghazaly dengan program kajian: *Hadits Shahih* Bukhari; *Nurul Yakin*;

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 and www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

Kiyafatul Akhyar; *Ihya Ulumuddin*; *Irsyadul Ibad*; *Ana Muslim*; Tafsir *Jalalain*/Aktual; Bahasa Arab; *Nashoihul Ibad*; *Riyadhus Sholihin*; *Fathul Qoriib*; *Tanqihul Qoul*; *Fiqh* Aktual; *Mukhtarul Ahadits*; dan Kitab *Minhajul Abidin*.

Majelis Ta'lim Masjid Raya Bogor dengan program kajian: *Riyadhus Sholihin*; *Fiqh*; *Aqidah*; *Tadabur*; *Al-Qur-an*; *Zakat*; Akhlak; *Sirah Nabawiyah*; *Fiqh* Wanita; Kajian *Al-Hadits*; Ibadah liannya.

Majelis Ta'lim Al-Ghifari (khusus ibu-ibu) dengan program kajian: *Tahsin* dan Kajian Tematik.

Majelis Ta'lim Mahasiswa IPB (Institut Pertanian Bogor) dengan program kajian: *Tafsir Al-Qur'an*; *Fiqh*; *Riyadus Sholihin*; serta *Sirah Nabawiyah* (Helmawati, 2013).

Mengingat kegiatan *majelis ta'lim* memiliki keterbatasan waktu, tenaga pengajar (*mu'allim*), serta keterbatasan pemahaman keagamaan para jemaah, maka beberapa *majelis ta'lim* hanya mengambil materi-materi tertentu saja. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa dalam kondisi tertentu, pengelola *majelis ta'lim* hanya mengambil materi atau bahan pengajaran berdasarkan skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman para jemaahnya. Bahkan dalam satu kasus, ketika *mu'allim* yang bertugas memberikan materi berhalangan hadir, maka kegiatan *majelis ta'lim* hanya diisi dengan membaca *Al-Qur'an* secara bersama-sama (wawancara dengan Responden C, 17/7/2016).

Berdasarkan beberapa contoh program *majelis ta'lim* di atas, ditemukan bahwa program kajian di *Majelis Ta'lim* Al-Ghazaly memiliki program kajian atau materi yang paling banyak. Oleh karena itu, tidak heran jika penyelenggaraan kegiatan di *majelis ta'lim* ini memang setiap hari dilaksanakan dengan waktu yang telah ditentukan oleh pengurus atau pengelola *majelis ta'lim*. Sementara kegiatan *majelis ta'lim* lain, dengan satu atau dua materi prioritasnya, hanya dilaksanakan satu minggu satu kali. Dari hasil penelitian terhadap *majelis ta'lim* dengan sampel purposif di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, kurang-lebih sebanyak 80% *majelis ta'lim* melaksanakan kegiatannya satu kali dalam satu minggu (Helmawati, 2013; dan wawancara dengan Responden C, 17/7/2016).

Perlu dijelaskan bahwa walaupun di lapangan terdapat beberapa *majelis ta'lim* yang menyelenggarakan kegiatan hampir setiap hari, tapi hal itu tidak menjadikan kewajiban bagi seluruh jemaah untuk selalu hadir. Justru, dengan banyaknya program atau materi yang dijadwalkan, sebenarnya memberikan informasi dan peluang kepada jemaah untuk hadir pada program atau materi yang memang diminati, atau ingin dipelajari, yang sesuai dengan waktu luangnya (Helmawati, 2013; dan wawancara dengan Responden C, 17/7/2016).

Program atau materi yang dirancang untuk kegiatan *majelis ta'lim*, pada umumnya, juga disertai dengan kitab atau buku yang menjadi panduan *mu'allim* atau *ustadz*. Jika program atau materi kajian yang diberikan adalah ilmu Tafsir *Al-Qur'an*, maka sudah tentu harus menggunakan *Al-Qur'an* sebagai kitab rujukan utama pemateri dan jemaah. Sedangkan materi tambahan lainnya adalah kitab yang digunakan dan disesuaikan dengan materi bahasannya. Kitab atau buku panduan yang digunakan ada yang berbahasa Indonesia dan ada pula yang menggunakan kitab berbahasa Arab. Bahkan ada beberapa pemateri, yaitu *ustadz*/*mu'allim,* membuat semacam diktat atau buku pedoman sebagai materi ajar bagi para jemaahnya (Kristanto, 2012; Helmawati, 2013; dan wawancara dengan

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 *and* ***www.mindamas-journals.com/index.php/insancita***

Responden C, 17/7/2016).

Hampir semua *majelis ta'lim* memiliki program di luar kurikulum, yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Kegiatan tersebut, diantaranya, yaitu: sunatan massal, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, serta tidak sedikit dari *majelis ta'lim* akhirnya mendirikan sekolah formal (Kristanto, 2012; dan Helmawati, 2013). Jemaah *majelis ta'lim* yang mendirikan sekolah itu biasanya menawarkan solusi untuk membantu jemaah, khususnya kaum ibu yang bekerja, dengan mendidik anak-anaknya agar memiliki kekuatan keagamaan dan pengetahuan yang baik. Niat baik dari kegiatan tersebut, tentu saja, menjadi salah satu solusi yang positif dalam menghadapi tantangan zaman di era globalisasi (Alawiyah, 1997; Daulay, 2009; az-Zahra, 2012; dan Helmawati, 2013).

Ketiga, **Proses *Ta'lim* atau Pendidik dan Metode**. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19, bahwa prinsip dalam proses pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Depag RI, 2010).

Namun, seperti yang banyak dijumpai, bahwa tidak semua penyelenggara kegiatan *majelis ta'lim* melaksanakan prinsip-prinsip tersebut. Beberapa kegiatan di *majelis ta'lim* bahkan ada yang hanya membaca ayat-ayat *Al-Qur'an* atau *shalawat* Nabi saja. Dan meskipun ada ceramah, penceramahnya cenderung monoton dengan bahasan kurang menyentuh pada kompleksitas permasalahan yang tengah dihadapi oleh para jemaah di zaman yang semakin tak menentu ini (Kristanto, 2012; dan Helmawati, 2013).

Mengenai Pendidik di Majelis Ta'lim. Pada umumnya, *majelis ta'lim* diasuh, dibina, dan dibimbing oleh para *mu'allim* atau *ustadz* atau *kyai*. Merekalah yang pada akhirnya menentukan warna atau mutu *majelis ta'lim*. Semakin *mu'allim* memiliki wawasan keagamaan yang luas, maka semakin banyak jemaah yang dapat diberikan pencerahan, baik rohani maupun intelektualnya. Itulah sebabnya, *majelis ta'lim* menjadi salah satu tempat bagi para pendidik atau *mu'allim* untuk melaksanakan misi dakwahnya (Huda, 1987; dan Helmawati, 2013).

Umumnya juga, keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan *majelis ta'lim* ditentukan oleh faktor kesadaran spiritual dan kebangkitan dorongan hati seseorang pada usia-usia tertentu untuk lebih mendekatkan diri pada Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*). Oleh karena itu, *kyai*/*ustadz*/*mua'llim*/guru di *majelis ta'lim* bukan semata-mata berperan sebagai pentransfer ilmu, namun juga pembimbing, terutama dalam memberikan bimbingan ruhani bagi jemaahnya. Banyak jemaah yang bertahan menggali ilmu agama di satu *majelis ta'lim,* karena *kyai*/*ustadz*/*mua'llim*/guru atau pendidiknya yang memang kompeten dalam keilmuan, ditambah dengan menggunakan metode yang tepat, sehingga menarik para jemaah (Helmawati, 2013; dan Agustina, 2015).

Ada juga jemaah yang bertahan menuntut ilmu di *majelis ta'lim* tertentu, karena kepribadian dan solidaritas sosial, atau bahkan ketenaran dari *ustadz* atau *kyai*-nya. Namun, secara umum, tentu

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 and www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

seorang pendidik di *majelis ta'lim* harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang optimalisasi misi da'wahnya (Alawiyah, 1997; Depag RI, 2006 dan 2008; Daulay, 2009; az-Zahra, 2012; dan Helmawati, 2013).

Dalam beberapa kasus, pemateri di *majelis ta'lim* hanya membaca buku atau kitab yang menjadi pegangannya. Walaupun ada uraian atau penjelasan, pemateri hanya memberikan penjelasan sepatah dua patah kata saja. Selain itu, masih ada pemateri yang kurang logis (ilmiah) dalam memaparkan atau menjawab pertanyaaan atas permasalahan yang diajukan jemaahnya. Metode ceramah, umumnya, dilaksanakan secara konvensional, tanpa diikuti kutipan bahasan dari para pakar ahli atau sumber rujukan ilmiah (Helmawati, 2013; dan Azizah, 2014).

Di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, hal tersebut tentu membuat pengetahuan dan wawasan jemaah tidak berkembang. Berdasarkan hasil observasi lapangan ditemukan bahwa jika *majelis ta'lim* diselenggarakan di bawah lembaga perguruan tinggi, maka pada umumnya yang mengisi kegiatan di *majelis ta'lim* adalah *ustadz* atau *mu'allim* yang berprofesi sebagai dosen, atau mungkin guru besar. Tentu saja, pemateri yang berprofesi sebagai dosen dapat memberikan pencerahan yang lebih, baik dari sisi ruhani maupun sisi ilmiah atau logika jemaahnya (Helmawati, 2013).

Mengenai Metode Pendidikan di Majelis Ta'lim. Penggunaan metode dalam penyampaian materi pendidikan memiliki peranan yang penting, sehingga akan mempengaruhi pencapaian keberhasilan proses belajar-mengajar secara signifikan (Helmawati, 2013; dan Azizah, 2014). Bagi pendidik di *majelis ta'lim*, banyak cara atau metode yang dapat digunakan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Tentunya, cara atau metode tersebut tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan lembaga pendidikan keagamaan yang bersifat formal. Artinya, dalam menentukan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi jemaahnya, yang mayoritas sudah dewasa, bahkan sudah lanjut usia (Roqib, 2009; dan Helmawati, 2013).

Jika ditinjau dari metode penyajian, kegiatan di *majelis ta'lim* dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: (1) *Majelis ta'lim* yang dikelola dengan metode ceramah; (2) *Majelis ta'lim* yang dikelola dengan metode *halaqah*; (3) *Majelis ta'lim* yang dikelola dengan metode *mudzakarah*; serta (4) *Majelis ta'lim* yang dikelola dengan metode campuran (Hamid, 1991; Asrohah, 1997; Helmawati, 2013; dan Mustofa, 2016).[1] Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Majelis ta'lim yang dikelola dengan metode ceramah, biasanya, dilaksanakan dengan dua cara. *Pertama*, ceramah umum, di mana *mu'allim* bertindak aktif dengan memberikan ceramah; sedangkan peserta berperan pasif, hanya mendengarkan materi yang diceramahkan. *Kedua*, ceramah terbatas, di mana biasanya terdapat kesempatan untuk bertanya-jawab. Di sini, antara *mu'allim* dan jemaah sama-sama aktif.

Majelis ta'lim yang dikelola dengan metode *halaqah*, biasanya, *mu'allim* memberikan pelajaran dengan memegang suatu kitab tertentu. Jemaah

[1]Lihat juga, misalnya, "Majlis Taklim". Tersedia secara online di: http://penamasdramaga.blogspot.co.id/2010/09/majlis-taklim_24.html [diakses di Bandung, Indonesia: 3 Juli 2017].

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776** and **www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

mendengarkan keterangan pengajar, sambil menyimak kitab yang sama. Bedanya dengan metode ceramah terbatas, yaitu peranan *mu'allim* dalam metode *halaqah* jauh lebih menonjol dan *mu'allim* seringkali harus mengulang-ngulang sesuatu bacaan dan kemudian ditirukan oleh jemaah, serta membetulkan bacaan yang salah.

Majelis ta'lim yang dikelola dengan metode *mudzakarah*, biasanya, dilaksanakan dengan cara tukar-menukar pendapat, atau diskusi, mengenai suatu masalah yang telah disepakati untuk dibahas.

Majelis ta'lim yang dikelola dengan metode campuran, biasanya, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, atau pengajian, tidak hanya dengan satu macam metode saja, melainkan dengan berbagai metode secara berselang-seling.

Selanjutnya, metode yang umum digunakan dalam proses kegiatan di *majelis ta'lim*, berdasarkan hasil penelititan yang dilakukan oleh penulis, adalah metode membaca (*Al-Qur'an* atau kitab lainnya); ceramah umum (konvensional); ceramah ilmiah (memaparkan beberapa teori disertai presentasi dengan bantuan media tekhnologi); mendengarkan; serta tanya-jawab. Metode pendidikan yang memberikan kontribusi cukup besar bagi jemaah adalah metode *tilawah* dan mendengar (Helmawati, 2013).

Keempat, **Evaluasi Pendidikan di *Majelis Ta'lim***. Suharsimi Arikunto (1996) menyatakan bahwa evaluasi adalah penilaian setelah dilakukan pengukuran sebelumnya. Sedangkan penilaian adalah kegiatan menilai dalam proses dan hasil pendidikan. Evaluasi juga, dalam istilah asing, dinamakan *assessment* atau penilaian (Arikunto, 1996:3). Jika evaluasi atau penilaian dilaksanakan dalam proses kegiatan di *majelis ta'lim,* maka evaluasi berarti suatu kegiatan menilai sampai sejauh mana program *majelis ta'lim* telah dijalankan.

Evaluasi atau penilaian tidak saja dilakukan terhadap program, tetapi juga dapat dilakukan terhadap proses pembelajaran, pelayanan, atau jemaah. Dalam pelaksanaannya, evaluasi atau penilaian dapat dilakukan melalui rapat atau melalui instrumen yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Instrumen tersebut dapat berupa wawancara, observasi atau angket; yang selanjutnya instrumen diberikan tidak hanya kepada penyelenggara, *mu'allim*, jemaah, bahkan mungkin masyarakat sekitar untuk diisi (Wandersman, 2005; dan Helmawati, 2013).

Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa sedikit sekali pengelola *majelis ta'lim* menyelenggarakan evaluasi terhadap program atau proses kegiatan yang dilaksanakannya. Hal itu terjadi, salah satunya, adalah karena beberapa penyelenggara *majelis ta'lim* memang belum memiliki program yang tercatat, sehingga mereka mengalami kesukaran untuk mengukur keberhasilan programnya. Di sisi lain, banyak juga kegiatan *majelis ta'lim* yang homogen dalam program kajian, sehingga penyelenggara merasa tidak perlu melakukan pencatatan, dikarenakan sudah hafal akan program untuk *majelis ta'lim* yang dikelolanya (Hamid, 1991; Asrohah, 1997; Helmawati, 2013; dan Mustofa, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lima *majelis ta'lim* secara purposif, yang telah penulis lakukan, menunjukan bahwa ada beberapa pengelola *majelis ta'lim* yang

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 and www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

telah melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap program, jemaah, dan pelayanan; namun ada pula penyelenggara *majelis ta'lim* yang belum melaksanakan kegiatan evaluasi (Helmawati, 2013).

Optimalisasi Komponen Majelis Ta'lim dalam Meningkatkan Pendidikan Perempuan di Indonesia. Ada empat hal yang perlu diperhatikan dan dibahas dalam kajian ini, yaitu: (1) Optimalisasi Tujuan di *Majelis Ta'lim* bagi Pendidikan Perempuan; (2) Optimalisasi Program atau Kurikulum di *Majelis Ta'lim* bagi Pendidikan Perempuan; (3) Optimalisasi Proses Kegiatan di *Majelis Ta'lim* bagi Pendidikan Perempuan; serta (4) Optimalisasi Evaluasi Kegiatan di *Majelis Ta'lim* bagi Pendidikan Perempuan. Penjelasanya adalah sebagai berikut:

Pertama, **Optimalisasi Tujuan di *Majelis Ta'lim* bagi Pendidikan Perempuan**. Berdasarkan penelitian kontribusi pendidikan dari *majelis ta'lim*, pengaruh pembelajaran yang diperoleh dari *majelis ta'lim*, khususnya bagi perempuan, yaitu, diantaranya, peningkatan pengetahuan keagamaan (Daradjat, 1984; dan Helmawati, 2013). Pengetahuan keagamaan yang diperoleh dari *majelis ta'lim* dapat membantu meningkatkan keimanan jemaah. Sekitar 90% jemaah yang menghadiri kegiatan *majelis ta'lim* menyatakan bahwa tujuan mereka mengikuti kegiatan di *majelis ta'lim* adalah untuk tujuan keimanan. Dan tujuan keimanan ini mendominasi dari tujuan lainnya, seperti tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan umum atau wawasan dan keterampilan (*cf* Helmawati, 2013; dan Setyaningsih, 2014).

Indikator kontribusi pengetahuan keagamaan atau keimanan yang dapat diajarkan oleh ibu kepada anak-anaknya, yaitu: sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadi dengan Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*), seperti shalat, mengaji, puasa, dan lainnya; sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan dirinya dengan masyarakat, seperti sopan-santun dan hormat terhadap orang tua atau tetangga, ramah, suka menolong, dan jujur; sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitar, seperti saling menghormati dan menjaga kebersihan atau keamanan diri, keluarga, dan lingkungan; serta sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah SWT, anggota masyarakat, serta khalifah Allah SWT, seperti rajin belajar, tidak tawuran, tidak menggunakan narkoba, dan tidak terjerumus dalam pergaulan bebas (Daradjat, 1984; Helmawati, 2013; dan Setyaningsih, 2014).

Majelis ta'lim juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan. Tidak semua orang tua dapat mengajak anak-anaknya, yang telah berkeluarga atau memiliki kegiatan sendiri-sendiri, untuk ikut serta dalam kegiatan *majelis ta'lim,* karena jarak yang cukup jauh dan menyita waktu. Oleh karena itu, sebagai gantinya, ada orangtua yang menyelenggarakan sendiri *majelis ta'lim* di rumah bersama anak-menantunya satu bulan sekali (Helmawati, 2013; dan Mustofa, 2016).

Materi yang diberikan, antara lain, yaitu hal-hal yang berisi pembinaan pengetahuan hidup dalam bermasyarakat dengan metode latihan, di antaranya dengan dilatih menjadi MC (*Master of Ceremony*), ceramah atau kultum (kuliah tujuh menit), dan membaca hadiah-hadiah setiap bulan di rumah. Kegiatan *majelis ta'lim* dalam keluarga yang dilakukan sebulan sekali seperti itu memiliki banyak manfaat. Manfaat yang

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 *and* ***www.mindamas-journals.com/index.php/insancita***

dapat diperoleh dari *majelis ta'lim* dalam keluarga, di antaranya, yaitu: menambah tali silaturahim antara orangtua, anak-mantu, dan cucu; adanya kesinambungan pengawasan dan nasehat-nasehat yang baik dari orangtua kepada anak-anaknya; serta pembinaan kaderisasi generasi muda sebagai pengganti orangtua di kemudian hari (Helmawati, 2013).

Majelis ta'lim bertujuan juga untuk ikut serta dalam mengentaskan buta aksara. Data dari www.jkt.kompas.com, tertanggal 21 Oktober 2011, menginformasikan bahwa tercatat sekitar 8.3 juta warga negara Indonesia penyandang buta aksara. Sebagian besar adalah orang-orang yang berusia di atas 40 tahun. Berdasarkan data tersebut, pemerintah kembali berjanji akan menekan angka buta aksara pada 2-3 tahun berikutnya. Untuk mendukung usaha pemerintah dalam mengentasan buta aksara, sebab dari jumlah 8.3 juta itu sekitar 5.1 juta diantaranya adalah perempuan, maka sangat tepat keberadaan dari *majelis ta'lim* untuk diberdayakan secara optimal (Wilastinova, 2011; Helmawati, 2013; dan Firdaus, 2016).

Pada peringatan Hari Aksra Internasional yang ke 46, tanggal 21 Oktober 2011, dikemukakan mengenai apa yang dimaksud dengan "hambatan kultural". Pendidikan keaksaraan, dengan demikian, harus dikembangkan melalui pendekatan yang sifatnya kemasyarakatan. Kegiatan pendidikan keaksaraan harus melalui media yang efektif, misalnya dengan menggunakan tempat-tempat ibadah sebagai sarana untuk melaksanakannya. Tempat sarana-sarana ibadah tersebut salah satunya, tentu saja, adalah masjid atau mushola (dalam Helmawati, 2013).

Majelis ta'lim, yang merupakan tempat menimba ilmu dalam kultur umat Islam, tentu dapat dijadikan salah satu solusi dalam mengentaskan buta aksara di Indonesia. Dengan revitalisasi program, jemaah yang masih di jenjang pendidikan dasar dapat mengikuti ujian kesetaraan, sehingga dapat meningkatkan jenjang pendidikan ke tingkat berikutnya. Begitu pula bagi jemaah yang buta aksara, pengelola *majelis ta'lim* dapat membuat program khusus untuk pengentasan buta aksara (Daradjat, 1984; Hamid, 1991; Asrohah, 1997; Helmawati, 2013; dan Mustofa, 2016).

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 106 dan Bab III, yaitu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi (Setneg RI, 2010). Salah satu contoh bahwa penyelenggaraan *majelis ta'lim*, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, jemaahnya bergeser ke arah jenjang pendidikan semi-formal (berkelas dan berjenjang), seperti nampak di *majelis ta'lim* Masjid Istiqlal di Jakarta dan Masjid Pemda (Pemerintah Daerah) di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia (dalam Helmawati, 2013).

Majelis ta'lim bertujuan dan merupakan tempat pendidikan seumur hidup yang berbasis masyarakat. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, pada masa yang akan datang, adalah mereka yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, agar manusia Indonesia memiliki kualitas yang memadai, harus dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Salah satu tempat penyelenggaraan pendidikan yang dapat membantu merealisasikan hal tersebut

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 and www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

adalah *majelis ta'lim* (Daradjat, 1984; Helmawati, 2013; dan Wahyuddin, 2016).

Dalam prakteknya, *majelis ta'lim* merupakan tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat waktu ataupun tempat. *Majelis ta'lim* bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial, dan jenis kelamin. Fleksibelitas *majelis ta'lim* inilah yang menjadi kekuatan, sehingga mampu bertahan dan merupakan lembaga pendidikan Islam yang paling dekat dengan umat atau masyarakat Islam (Alawiyah, 1997; Depag RI, 2006 dan 2008; Daulay, 2009; az-Zahra, 2012; dan Helmawati, 2013).

Dengan demikian, *majelis ta'lim* menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi jemaah, para orangtua khususnya, yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, biaya, dan kesempatan menimba ilmu, baik agama maupun pengetahuan umum, pada jalur pendidikan formal. Di sinilah peran *majelis ta'lim* menjadi sangat penting bagi jemaah, yaitu sebagai tempat pendidikan seumur hidup atau *life long education* (Suwirta, Saripudin & Abdulkarim eds., 2008; Helmawati, 2013; dan Wahyuddin, 2016).

Kedua, **Optimalisasi Program atau Kurikulum di *Majelis Ta'lim* bagi Pendidikan Perempuan**. Dalam prakteknya, banyak *majelis ta'lim* yang belum merumuskan perubahan kurikulum atau rancangan *ta'lim* sebagai dasar pengajaran. *Majelis ta'lim* biasanya mengandalkan kemampuan seorang *mu'allim* dalam memberikan materi *ta'lim* secara dadakan, atau membawakan tema sesuai dengan *event-event* yang sedang dihadapi tanpa konsep yang disusun oleh pengurus *majelis ta'lim* terlebih dahulu. Pola *ta'lim* seperti itu didasarkan pada tradisi yang diwarisi dari para pendahulunya, yang belum memahami dan mengaplikasikan manajemen pengelolaan. Dapat dikatakan bahwa kegiatan *majelis ta'lim* berjalan secara alamiah dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sebelumnya (Azra, 2002; dan Helmawati, 2013).

Meskipun demikian, sebagai sebuah lembaga pendidikan non-formal, *majelis ta'lim* perlu memikirkan tantangan-tantangan yang sedang dihadapinya saat sekarang. Dalam hal ini, *majelis ta'lim* perlu membuat semacam perencanaan kurikulum yang terstruktur agar kegiatan berjalan dengan terencana, sistematis, dan lebih mudah untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah berjalan. Dari rancangan kurikulum yang baik akan mampu memberikan manfaat yang lebih baik lagi dari sebelumnya (Siregar, 2013). Oleh karena itu, sudah waktunya *majelis ta'lim* memiliki kurikulum tersendiri, yang disusun secara profesional melalui penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna.

Ada dua pendekatan yang sering ditempuh dalam menyusun kurikulum, yaitu pendekatan yang berorientasi pada bahan pelajaran dan pendekatan yang berorientasi pada tujuan pengajaran (Idi, 2007; dan Muhaimin, 2010). Pendekatan yang berorientasi pada bahan pelajaran, pertanyaan yang pertama kali timbul dalam menyusun kurikulum adalah bahan atau materi apa yang perlu diajarkan. Jika bahan atau materi *ta'lim* sudah ditentukan, barulah bahan itu diuraikan secara terperinci menjadi pokok atau tema bahasan dalam *majelis ta'lim*.

Pada pendekatan yang berorientasi pada tujuan pengajaran, pertanyaan pertama kali yang timbul dalam menyusun

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776** and **www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

kurikulum adalah tujuan-tujuan apa saja yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan tersebut dapat berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap yang diharapkan dimiliki peserta didik, setelah mengikuti program *majelis ta'lim*. Atas dasar tujuan-tujuan tersebut, barulah ditetapkan bahan yang akan diajarkan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dan biasanya, di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, lebih cenderung memilih cara kedua, atau berorientasi pada tujuan, dalam menyusun kurikulumnya (Idi, 2007; Helmawati, 2013; dan Siregar, 2013).

Program kurikulum yang terstruktur, seperti yang diprogram pemerintah dan ditetapkan dalam undang-undang pendidikan serta peraturan pemerintah, dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan: (1) Pendidikan keagamaan Islam, dengan materi: *tauhid, aqidah, syariah, fiqh, hadits, tafsir*, dan *akhlak*; (2) Pendidikan anak usia dini, dengan materi: ilmu pendidikan anak, psikologi, jasmani, dan kebersihan; (3) Pendidikan keaksaraan, dengan materi: menulis, membaca, dan berhitung; (4) Pendidikan kesetaraan, dengan materi: kesetaraan dalam memperoleh hak pendidikan yang sama; (5) Pendidikan kecakapan hidup, dengan materi: bahasa, kewirausahaan atau berdagang, teknologi, ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan politik; (6) Pendidikan pemberdayaan perempuan, dengan materi: pendidikan keluarga, memasak, menjahit, manajemen rumah tangga, dan manajemen keuangan; (7) Pendidikan kepemudaan, dengan materi: kepemimpinan dan organisasi; serta (8) Pendidikan non-formal lainnya, seperti *majelis ta'lim* (Daradjat, 1984; Hamid, 1991; Asrohah, 1997; Helmawati, 2013; dan Mustofa, 2016).

Dalam menetapkan materi ajar yang sesuai dengan tujuan pada *majelis ta'lim*, dan mempunyai tingkatan atau program khusus, hendaknya dibuat klasifikasi tingkatan dan jenis program yang dimaksud. Dari tujuan dan materi yang telah ada, *majelis ta'lim* perlu menetapkan pokok bahasan, judul atau bab yang dipilih dari suatu mata pelajaran yang tertera dalam struktur program. Pokok bahasan tersebut kemudian diperinci menjadi sub-pokok bahasan. Dampak diversifikasi kegiatan *ta'lim* yang terstruktur tersebut, memungkinkan mengubah posisi *majelis ta'lim* dari pendidikan non-formal menjadi pendidikan semi formal atau formal (Daulay, 2005; dan Helmawati, 2013).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, terutama Pasal 100, 101, 102, dan 106, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan non-formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan non-formal, di antaranya yatitu *majelis ta'lim* (Setneg RI, 2010). Penyelenggaraan program pendidikan non-formal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pendidikan kecakapan hidup; pendidikan anak usia dini; pendidikan kepemudaan; pendidikan pemberdayaan perempuan; pendidikan keaksaraan; pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; dan pendidikan kesetaraan (Setneg RI, 2010; dan Suparlan, 2016).

Pasal 101 menyatakan bahwa hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Pasal 102 menyatakan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan non-formal adalah: sebagai pengganti, penambah,

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776** and **www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

dan/atau pelengkap pendidikan formal atau sebagai alternatif pendidikan; dan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional; serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat (Setneg RI, 2010; dan Suparlan, 2016).

Pendidikan non-formal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional, mengembangkan jiwa wirausaha yang mandiri, serta kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Setneg RI, 2010; Helmawati, 2013; dan Suparlan, 2016).

Ketiga, **Optimalisasi Proses Kegiatan di *Majelis Ta'lim* bagi Pendidikan Perempuan**. Dalam proses pendidikan yang dilaksanakan di *majelis ta'lim* perlu memaksimalkan semua komponen yang ada, baik itu tujuan, kurikulum, *mu'allim*, metode, jemaah, fasilitas, biaya, pengelolaan, media, lingkungan, atau sumber yang ada. Dari semua komponen pendidikan tersebut, yang paling utama adalah komponen pendidik atau *mu'allim* dan metode yang digunakannya. *Mu'allim* sebagai pendidik di *majelis ta'lim* hendaknya memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial (Susila, 2011; dan Helmawati, 2013).

Sebelum pengajaran dimulai, hendaknya seorang *mu'allim* terlebih dahulu mengetahui kondisi umum *majelis ta'lim*, misalnya kondisi lingkungan, jemaah, tempat, dan lain-lain. Hal itu penting untuk menentukan perkiraan dan variasi yang mungkin terjadi. Pengenalan terhadap peserta didik tidak saja mengenal gambaran umum peserta, tetapi juga taraf pengetahuan, status sosial, dan sifat-sifat umum; atau bahkan juga jemaah khusus, seperti: pejabat atau ulama setempat, ikatan kelompok, serta minat dan perhatian jemaah. Hal ini penting untuk membantu mempersiapkan bahan pengajaran, pengetahuan, metode, pendekatan, serta untuk menanamkan motivasi yang lebih kuat bagi jemaah (Daradjat, 1984; Susila, 2011; dan Helmawati, 2013).

Pada umumnya, proses mengajar di *majelis ta'lim* mencakup tiga fase, yaitu: fase pertama merupakan pendahuluan, dalam bentuk tindakan pendahuluan seorang *mu'allim*, seperti memusatkan perhatian jemaah, atau bila perlu menghubungkan pelajaran saat itu dengan pelajaran yang terdahulu, termasuk pula di dalamnya adalah *muqaddimah* atau pembukaan, yang lazim terdapat dalam setiap *majelis ta'lim*. Fase kedua berpusat pada proses belajar secara aktif, dimana dalam fase ini *mu'allim* harus waspada terhadap faktor-faktor yang membutuhkan perhatian khusus, baik dari *mu'allim* sendiri maupun dari jemaah. Perhatian *mu'allim* harus terpusat pada bermacam-macam hal, umpamanya penguasaan dan pengendalian peserta, perbedaan individual peserta, penyampaian bahan atau materi, metode, alat, dan juga penguasaan terhadap dirinya. Fase ketiga adalah saat-saat pengajaran atau *ta'lim* akan selesai, dimana dalam fase ini perhatian *mu'allim* hendaknya lebih terfokus pada konsolidasi bahan, merapikan, mengumpulkan, dan saat-saat untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan. Pada fase ini pula hendaknya seorang

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776** and **www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

mu'allim membuat ikhtisar atau abstraksi dari bahan yang telah diajarkannya, atau dapat pula menetapkan batasan yang akan dipakai dalam pengajaran yang akan datang (Alawiyah, 1997; Depag RI, 2006 dan 2008; Daulay, 2009; az-Zahra, 2012; dan Helmawati, 2013).

Dari semua fase tersebut, partisipasi jemaah sangatlah menentukan. Tanpa partisipasi aktif dari jemaah, apa yang telah dilakukan *mu'allim* akan menjadi perbuatan yang sia-sia dan mubazir. Karenanya, seorang *mu'allim* harus memiliki integritas keilmuan dan kemampuan berkomunikasi dengan baik dalam *majelis ta'lim* (Alawiyah, 1997; dan Muhammad, 2015).

Keempat, **Optimalisasi Evaluasi Kegiatan di *Majelis Ta'lim* bagi Pendidikan Perempuan**. Evaluasi atau penilaian dilakukan dalam rangka pengendalian mutu sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di *majelis ta'lim*. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik atau jemaah, lembaga penyelenggara, pendidik atau *mu'allim*, dan program atau kurikulum. Setidaknya, dengan adanya penilaian atau evaluasi di *majelis ta'lim* akan memiliki tiga keuntungan, yaitu: (1) untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan telah dicapai oleh jemaah; (2) untuk melihat tingkat keberhasilan *mu'allim* dalam proses pengajaran; serta (3) untuk mengetahui sampai sejauh mana keberhasilan pengurus dalam memberikan pelayanan kepada jemaah dan juga sebagai pedoman untuk memperbaiki program atau tata kerjanya (*cf* Arikunto, 1996; Tafsir, 2004; dan Arifin, 2009).

Penilaian atau evaluasi dapat dilakukan melalui rapat, atau dengan menggunakan instrumen yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kegiatan penilaian bagi jemaah dapat dibuat dalam sistem klasikal dan perjenjang, sesuai dengan pilihan (kekhususan) program yang diminati. Jemaah yang telah menyelesaikan kegiatan pembelajaran di *majelis ta'lim* tersebut dapat mengikuti ujian kesetaraan hasil belajar, seperti di jenjang pendidikan formal. Dan jemaah yang telah memenuhi syarat serta lulus dalam ujian kesetaraan akan memperoleh ijazah, sesuai dengan program yang diikutinya (Helmawati, 2013; dan Suparlan, 2016).

Ijazah hasil dari pendidikan di *majelis ta'lim* dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Selanjutnya, evaluasi atau penilaian terhadap *mu'allim* dilaksanakan guna mendapat setifikasi pendidik; sedangkan bagi lembaga dapat dilakukan untuk memperoleh akreditasi lembaga berkenaan (Arikunto, 1996; Arifin, 2009; dan Musfah & Herlanti eds., 2017).

KESIMPULAN

Majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang berciri khas nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pendidikan, serta memiliki nilai-nilai prinsip pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Komponen-komponen dalam *majelis ta'lim* minimal terdiri dari komponen tujuan, program, proses, dan evaluasi. Berdasarkan penelitian optimalisasi pendidikan dari *majelis ta'lim*, ianya memberikan kontribusi atau pengaruh bagi perempuan, sebagai berikut:

Pertama, peningkatan pengetahuan keagamaan. Pengetahuan keagamaan yang diperoleh dari *majelis ta'lim* dapat membantu meningkatkan keimanan jemaah. Sekitar 90% jemaah yang menghadiri kegiatan *majelis ta'lim*

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 and www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

menyatakan bahwa tujuan mereka mengikuti kegiatan tersebut adalah untuk tujuan keimanan. Tujuan keimanan mendominasi dari tujuan lainnya, seperti: tujuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan umum atau wawasan dan keterampilan. Indikator peningkatan pengetahuan keagamaan atau keimanan yang didapat dari *majelis ta'lim*, yaitu: meningkatnya perilaku ibadah, seperti: shalat, mengaji, puasa, dan lainnya; serta meningkatkan pembentukan karakter, seperti: sopan-santun, ramah, suka menolong, jujur, saling menghormati, menjaga kebersihan, rajin belajar, menjaga diri dan keluarga, serta memelihara lingkungan sebagai amanah.

Kedua, mengembangkan keterampilan. Ada beberapa kasus yang menyelenggarakan sendiri *majelis ta'lim* di rumah bersama anak-menantunya satu bulan sekali. Materi yang diberikan, antara lain, yaitu: materi yang berisi pembinaan pengetahuan hidup dalam bermasyarakat dengan metode latihan, diantaranya dengan dilatih menjadi MC (*Master of Ceremony*), ceramah atau kultum (kuliah tujuh menit), dan membaca hadiah-hadiah setiap bulan di rumah. Kegiatan *majelis ta'lim* dalam keluarga yang dilakukan sebulan sekali seperti itu memiliki banyak manfaat.

Ketiga, mengentaskan buta aksara. *Majelis ta'lim,* yang merupakan tempat menimba ilmu dalam kultur umat Islam, tentu dapat dijadikan salah satu solusi dalam mengentaskan buta aksara di Indonesia. Dengan revitalisasi program, jemaah yang masih di jenjang pendidikan dasar dapat mengikuti ujian kesetaraan, sehingga dapat meningkatkan jenjang pendidikan ke tingkat berikutnya. Begitu pula bagi jemaah yang buta aksara, pengelola *majelis ta'lim* dapat membuat program khusus untuk pengentasan buta aksara tersebut. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Keempat, tempat pendidikan seumur hidup yang berbasis masyarakat. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah mereka yang mampu menghadapi persaingan semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, agar manusia Indonesia memiliki kualitas yang memadai, harus dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Salah satu tempat penyelenggara pendidikan yang dapat membantu merealisasikan hal tersebut adalah *majelis ta'lim*.

Dengan demikian, *majelis ta'lim* menjadi lembaga pendidikan alternatif bagi jemaah, para orangtua khususnya, yang tidak memiliki cukup tenaga, waktu, biaya, dan kesempatan menimba ilmu, baik agama maupun pengetahuan umum, pada jalur pendidikan formal. Di sini pulalah peran *majelis ta'lim* menjadi sangat penting bagi jemaah, yaitu sebagai tempat pendidikan seumur hidup atau *life long education*.[2]

Referensi

Agustina, Irma. (2015). "Kegiatan Pengajian Rutin pada Majelis Ta'lim Miftahul Huda dan Pengaruhnya terhadap Akhlak Beragama Remaja Usia 13-19 Tahun di Desa Bojong Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon". *Skripsi*

[2]***Pernyataan:*** Saya, dengan ini, menyatakan bahwa artikel ini adalah karya asli saya sendiri; dan ianya bukan merupakan hasil plagiat, karena semua kutipan dan gagasan atau konsep yang disebutkan dalam artikel ini dicantumkan secara lengkap dan benar, sesuai dengan panduan umum pengutipan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 *and* ***www.mindamas-journals.com/index.php/insancita***

Sarjana Tidak Diterbitkan. Cirebon: IAIN [Institut Agama Islam Negeri] Syekh Nurjati. Tersedia secara online juga di: http://repository.syekhnurjati.ac.id/2803/1/IRMA%20AGUSTINA [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Ainiyah, Qurrotul. (2015). "Peran Perempuan dalam Pendidikan Islam: Perspektif Gender". Tersedia secara online di: file:///C:/Users/acer/Downloads/1012-Article%20Text-3117-1-10-20151229.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

al-Ashfahâni, Al-Râghib. (t.th.). *Al-Mufradât fî Gharîb Al-Qurân*. Libanon: Dâr al-Ma'rifah.

Alawiyah, Tutty. (1997). *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim.* Bandung: Penerbit Mizan.

Alfiyah, Nur. (2014). "2013: Kekerasan terhadap Perempuan 280 Ribu Kasus". Tersedia secara online di: https://nasional.tempo.co/read/560496/2013-kekerasan-terhadap-perempuan-280-ribu-kasus [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

Andi, Feri. (2017). "Peran Majelis Ta'lim dalam Meningkatkan Pemahaman Keagamaan: Studi terhadap Majelis Ta'lim Nurul Hidayah di Desa Taraman Jaya, Kecamatan Semendawai Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Palembang: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN [Universitas Islam Negeri] Raden Fatah. Tersedia secara online juga di: http://eprints.radenfatah.ac.id/1050/1/FERI%20ANDI [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Arifin, M. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsimi. (1996). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara.

Asrohah, Harun. (1997). *Majelis Ta'lim*. Jakarta: Penerbit Logos.

Azizah, Rizka Hidayatul. (2014). "Pengembangan Sumber Belajar Majelis Taklim dan Paparan Data Observasi di Masjid Al-Munawar". Tersedia secara online di: http://kakech.blogspot.co.id/2014/06/pengembangan-sumber-belajar-majelis.html [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Azra, Azyumardi. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

az-Zahra, Azizah. (2012). "Majelis Ta'lim: Seputar Pengertian, Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan". Tersedia secara online di: https://bintuahmad.wordpress.com/2012/04/09/majelis-talim [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

Az-Zubaidi. (t.th.). *Tajul 'Arus min Jawahir al-Qamus*. Beirut: Al-Maktabah Asy-Syamilah.

BPS [Badan Pusat Statistik]. (2015). *Statistik Pemuda Indonesia 2015*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/48324-ID-statistik-pemuda-indonesia-2015.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design*. California: Sage Publications, Inc.

Daradjat, Zakiah. (1984). *Fungsi Majelis Ta'lim dalam Pembinaan Umat*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Daulay, Haidar Putra. (2005). *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Kencana.

Daulay, Haidar Putra. (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Penerbit Kencana.

Deny, Septian. (2015). "Catatan IOM: *Human Trafficking* Paling Banyak Terjadi di Indonesia". Tersedia secara online di: http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Depag RI [Departemen Agama Republik Indonesia]. (2006). *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.

Depag RI [Departemen Agama Republik Indonesia]. (2008). *Pedoman Pengelolaan Majelis Ta'lim*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.

Depag RI [Departemen Agama Republik Indonesia]. (2009). *Regulasi Majelis Ta'lim: Pedoman Pembinaan Majelis Ta'lim*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama RI [Republik Indonesia].

Depag RI [Departemen Agama Republik Indonesia]. (2010). *Pembangunan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.

Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Djamarah, Syaiful Bahri. (2014). *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*. Jakarta: Rhineka Cipta.

Firdaus, Mh. (2016). "Buta Aksara dan Pembangunan Manusia". Tersedia secara online di: https://www.kompasiana.com/idos/buta-aksara-dan-pembangunan-manusia [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

Franciska, Christine. (2015). "Bagaimana Mengakhiri Kekerasan terhadap Perempuan". Tersedia secara online di: http://www.bbc.com/

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam

indonesia/majalah/2015/11/151125_trensosial_kekerasan_perempuan [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

Gulton, Maidin & Taufik Siregar. (2005). "Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Perdagangan (*Trafficking*) Anak" dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Th.XXIII, No.2.

Hamid, Harizah. (1991). *Majelis Ta'lim*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.

Helmawati. (2013). *Pendidikan Nasional dan Optimalisasi Majelis Ta'lim: Peran Aktif Majelis Ta'lim Meningkatkan Mutu Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta.

Huda, Nurul. (1987). *Pedoman Majelis Ta'lim*. Jakarta: Penerbit KODI [Koordinasi Dakwah Islam].

Idi, Abdullah. (2007). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

IOM [International Organization for Migration]. (2014). *IOM 2013, Case Data on Human Trafficking: Global Figures & Trends*. Switzerland: IOM Publisher.

Ismail, Faisal. (2017). *Paradigma Pendidikan Islam: Analisis Historis, Kebijakan, dan Keilmuan.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kristanto, Nanang. (2012). "Pengelolaan Majelis Ta'lim IPPS (Ikatan Pengasuh Pengajian Sumbersari) sebagai Wadah Pemberdayaan Masyarakat Menuju Pendidikan Karakter di Kelurahan Sumbersari, Moyudan, Sleman, Yogyakarta". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNY [Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta]. Tersedia secara online juga di: http://eprints.uny.ac.id/27059/1/Nanang%20Kristanto.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 3 Juli 2017].

Mahahiri, Husain. (2002). *Pintar Mendidik Anak: Panduan Lengkap bagi Orang Tua, Guru, dan Masyrakat Berdasarka Ajaran Islam*. Jakarta: Penerbit Lentera.

"Majlis Taklim". Tersedia secara online di: http://penamasdramaga.blogspot.co.id/2010/09/majlis-taklim_24.html [diakses di Bandung, Indonesia: 3 Juli 2017].

Megawangi, R. *et al*. (2005). *Pendidikan Holistik*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.

Miles, M.B. & A.M. Huberman. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage Publications.

MPR RI [Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia]. (2010). *Undang-Undang Dasar 1945: Perubahan I, Perubahan II, Perubahan III, dan Perubahan IV*. Jakarta: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Muhaimin. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Iswantir. (2015). "Integritas Pendidik Profesional dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawabnya: Perspektif Pendidikan Islam". Tersedia secara online di: http://www.academia.edu/26204458/Integritas_Pendidik_Profesioan_dalam_Perspektif_Pendidikan_Islam [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Musfah, Jejen & Yanti Herlanti [eds]. (2017). *Pendidikan Islam: Isu dan Inovasi*. Jakarta: FITK [Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan] Press, UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah.

Mustofa, Muhamad Arif. (2016). "Majelis Ta'lim sebagai Alternatif Pusat Pendidikan Islam: Studi Kasus pada Majelis Ta'lim se Kecamatan Natar, Lampung Selatan" dalam *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol.1, No.1. Tersedia secara online juga di: file:///C:/Users/acer/Downloads/69-79-2-PB.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Nasution, S.M. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif.* Bandung: Penerbit Tarsito.

Nurtjahyo, Lidwina Inge & Choky R. Ramadhan [eds]. (2016). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Peradilan Pidana: Analisis Konsistensi Putusan*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Tersedia secara online juga di: http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/12/Kekerasan-Terhadap-Perempuan [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods*. Newbury Park: Sage Publications.

Quthb, Sayyid. (2003). *Terjemah Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press.

Rahmat, Pupu Saeful. (2009). "Penelitian Kualitatif" dalam *Jurnal Equilibrium*, Vol.5, No.9 [Januari-Juni]. Tersedia secara online juga di: http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 3 Juli 2017].

Ramayulis. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Roqib, Moh. (2009). *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Intergratif di Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.

Rosidin, Dedeng. (2003). *Akar-akar Pendidikan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.* Bandung: Pustaka Umat.

Rosita, Ita. (2017). "Peran Perempuan sebagai Pendidik: Perspektif M. Quraish Shihab". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandar Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN [Universitas Islam Negeri] Raden Intan. Tersedia secara online juga di: http://repository.radenintan.ac.id/2622/1/SKRIPSI_ITA_ROSITA.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Sahputra, Ade. (2012). "Peran UNESCO dalam Pemberantasan Buta Aksara di Indonesia Tahun 2007-2012" dalam *Jom FISIP*, Vol.1, No.2 [Oktober]. Tersedia secara online

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776** and **www.mindamas-journals.com/index.php/insancita

juga di: https://media.neliti.com/media/publications/31679-ID-peran-unesco [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

Sasongko, Agung. (2014). "Komnas PA: Indonesia Darurat Kejahatan Seksual terhadap Anak". Tersedia secara online di: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/11/13/ney4lh-komnas-pa-indonesia [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Setyaningsih, Ratna Tri. (2014). "Analisis Peranan Kegiatan Majelis Taklim Jami'atul Muslimah dalam Pembinaan Pengamalan Ibadah pada Ibu-ibu di Kelurahan Klasaman, Kecamatan Sorong Timur". *Tesis Magister Tidak Diterbitkan*. Makassar: Program Studi Pendidikan dan Keguruan, Pascasarjana UIN [Universitas Islam Negeri] Alauddin. Tersedia secara online juga di: http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2621/1/Ratna%20Tri%20Setyaningsih.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2008). *PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.* Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.

Setyawan, Davit. (2015). "KPAI: Pelaku Kekerasan terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat". Tersedia secara online di: http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/ [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Singarimbun, Masri & Sofwan Efendi. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Penerbit LP3ES.

Siregar, Rizaldy. (2013). "Pembinaan Manajemen dan Kurikulum Organisasi Majelis Ta'lim". Tersedia secara online di: https://rizaldysiregar.wordpress.com/2013/12/28/pembinaan-manajemen-dan-kurikulum-organisasi-majelis-talim [diakses di Bandung, Indonesia: 9 Oktober 2017].

Sujatmoko, Emmanuel. (2010). "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan" dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No.1 [Februari]. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak-warga-negara [diakses di Bandung, Indonesia: 3 Juli 2017].

Suparlan. (2016). "Pendidikan Non-Formal". Tersedia secara online di: http://masdik.com/1897/artikel/1897 [diakses di Bandung, Indonesia: 3 Juli 2017].

Susila, Yunia Esa. (2011). "Peranan Pendidikan Agama pada Masyarakat (PENAMAS) Kementerian Agama Kota Depok dalam Pengembangan Majelis Taklim". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN [Universitas Islam Negeri] Syarif Hidayatullah. Tersedia secara online juga di: http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5082/1/YUNIA [diakses di Bandung, Indonesia: 3 Juli 2017].

Suwirta, Andi, Didin Saripudin & Aim Abdulkarim [eds]. (2008). *Lifelong Education in Southeast Asian Countries: A Retrospect and Prospect for Gaining and Enhancing Prosperity, Progress, and Democracy*. Bandung: ASPENSI [Asosiasi Sarjana Pendidikan Sejarah Indonesia] Press.

Syahraeni, Andi. (2015). "Tanggung Jawab Keluarga dalam Pendidikan Anak". Tersedia secara online di: file:///C:/Users/acer/Downloads/2560-5466-1-SM.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

Tafsir, Ahmad. (2004). *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosdakarya.

Tafsir, Ahmad. (2008). *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu untuk Memamusiakan Manusia.* Bandung: Rosdakarya.

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan. (2009). *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Azasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.

Wahy, Hasbi. (2012). "Keluarga sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama" dalam *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, Vol.XII, No.2 [Februari], hlm.245-258. Tersedia secara online juga di: https://media.neliti.com/media/publications/81957-ID-keluarga [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

Wahyuddin, Wawan. (2016). "Pendidikan Sepanjang Hayat Menurut Perspektif Islam: Kajian Tafsir Tarbawi" dalam *SAINTIFIKA ISLAMICA: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol.3 No.2 [Juli – Desember], hlm.191-208. Tersedia secara online juga di: file:///C:/Users/acer/Downloads/98-73-301-1-10-20170109.pdf [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

Wandersman, Abraham *et al*. (2005). *The Principle of Empowerment Evaluation: Principles in Practice*. New York: The Gulford Press.

Wawancara dengan Responden A, Ketua BKMM (Badan Kerjasama *Majelis Ta'lim* Masjid), di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 3 Juli 2016.

Wawancara dengan Responden B, Ketua Penamas (Pendidikan Agama Islam pada Masyarkat dan Pemberdayaan Masjid), di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 10 Juli 2016.

Wawancara dengan Responden C, Pengurus sebuah *Majelis Ta'lim*, di Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada tanggal 17 Juli 2016.

Wilastinova, Reni Fatma. (2011). "Upaya Pemberantasan Buta Aksara di Indonesia". Tersedia secara online di: https://renyfatma.wordpress.com/2011/04/13/upaya-pemberantasan-buta-aksara-di-indonesia [diakses di Bandung, Indonesia: 2 Maret 2017].

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam

ISSN 2443-2776 and www.mindamas-journals.com/index.php/insancita



***Majelis Ta'lim* di Indonesia**
(Sumber: http://info.metrokota.go.id, 9/10/2017)

Majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang berciri khas nilai-nilai Islam dalam penyelenggaraan pendidikannya, serta memiliki nilai-nilai prinsip pendidikan dengan sistem terbuka dan multimakna. Komponen-komponen dalam *majelis ta'lim* minimal terdiri dari komponen tujuan, program, proses, dan evaluasi. Berdasarkan penelitian optimalisasi pendidikan dari *majelis ta'lim*, ianya memberikan kontribusi atau pengaruh bagi perempuan di Indonesia.

© 2018 by Minda Masagi Press in Bandung, Indonesia and BRIMAN Institute in BS Begawan, Brunei Darussalam
ISSN 2443-2776 *and* ***www.mindamas-journals.com/index.php/insancita***